2017, BAHAS 6 RAPERDA USULAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

Senin, 13 Maret 2017

Tahun 2017, DPRD Kabupaten Pasuruan merencanakan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Empat Raperda berasal dari usulan eksekutif, yaitu tentang ketertiban umum, revisi perda tentang pemberantasan pelacuran, bangunan gedung, dan perubahan tentang pemerintahan desa. Dua lainnya adalah usulan legislatif, yaitu revisi perda Tata Tertib DPRD dan kode etik.

Meskipun awalnya direncanakan ada empat Raperda tambahan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk empat kecamatan, pembahasannya ditunda karena evaluasi dari provinsi belum selesai. Empat Raperda usulan eksekutif dinilai penting, terutama Raperda perubahan tentang pemerintahan desa yang perlu disesuaikan dengan regulasi baru.

Revisi perda tentang pemberantasan pelacuran juga dianggap penting untuk mempersempit ruang gerak praktik prostitusi di Kabupaten Pasuruan. Perda yang ada dinilai hanya menjerat pekerja seks, sementara penyedia jasa dan pihak yang membantu prostitusi tidak terjerat.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, menyatakan keempat Raperda usulan eksekutif yang akan dibahas dianggap mendesak. Ia menjelaskan penundaan pembahasan empat Raperda lainnya karena belum siap dan akan dibahas kemudian.

Pembahasan keenam Raperda tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pasuruan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.